ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Fransiska Novita Eleanora
FH Universitas MPU Tantular Jakarta

ABSTRACT

The arbitration is the way of solving of a dispute outside judicial institution, based on the agreement of the parties having dispute. The purpose of this paper is to know the solving of a dispute through arbitration whether it can give rule of law to the both parties who have dispute. The method applied is bibliography study and other referencial resources. The result shows that decision having the character of final and can be accepted by the parties having dispute.

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Masyarakat semakin meninggalkan cara-cara kebiasaan dan beralih ke cara-cara hukum yang diakui dalam undang-undang (Gatot Soemartono, 2006:41).

Sengketa antar sesama manusia adalah fakta yang hampir tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa harus selalu dicari jalan keluarnya. Sesungguhnya tidak ada sengketa yang tidak ada jalan keluarnya, sehingga berpulang kepada manusianya. Mau atau tidak mau mencari dan melakukan jalan keluar yang ada. Jika diperhatikan berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa, dapat diketahui bahwa setiap bentuk penyelesaian sengketa memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu, yaitu untuk memuaskan semua pihak dan berjalan dengan baik. Tetapi seringkali yang muncul dalam upaya untuk memperoleh kesepakatan hanya berupa bentuk pemaksaan yang terselubung, dimana para pihak yang bersengketa dipaksa untuk menyetujuinya demi kepentingan keharmonisan komunitas. (Priyatna Abdurrasyid, 2002:17). Penyelesaian sengketa, tidak hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan saja, tetapi dapat juga diselesaikan diluar jalur hukum yang dikenal dengan lembaga arbitrase, dimana dalam penyelesaian sengketa dipilih Arbiter yang kompeten dalam menyelesaikan suatu konflik.

Dalam proses **Ajudikasi**, baik seorang hakim dan Arbiter mencari bukti-bukti dan menerapkannya, baik

terhadap bukti yang ditemukan maupun terhadap persoalan-persoalan yang dibentuk melalui proses gugatan. Korelasi atau berhubungan berbanding, perlu adanya perubahan dari **memutuskan perkara** menjadi **menyelesaikan perkara** adalah arbitrase atau cara-cara lain penyelesaian sengketa diluar proses pengadilan, mempunyai maksud yang sama yaitu, menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.

Pranata arbitrase sebagai sarana menyelesaikan sengketa hukum diluar proses pengadilan bukan suatu hal yang baru dalam sistim penyelesaian sengketa hukum diIndonesia. Namun yang terjadi dimasa lalu diIndonesia Arbitrase kurang menarik perhatian sehingga kurang populer di masyarakat kita. Berbeda dengan sekarang, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum penting sebagai cara menyelesaikan sengketa dalam proses peradilan.

Mengenai eksistensi pranata arbitrase, sebenarnya sudah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia juga telah ditopang oleh sebuah lembaga yaitu **BANI** (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Namun dalam praktek realisasinya para praktisi masih enggan untuk memasang papan nama. Hal tersebut berbeda dengan negara-negara maju seperti Amerika dan Kanada, dimana banyak praktisi hukum atau ahli-ahli lain yang mengkhususkan sebagai arbiter.

Tujuan penulisan makalah ini untuk: mengetahui (1) apakah penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak

yang bersengketa, (2) apakah arbitrase merupakan sarana penyelesaian sengketa yang efektif? Metode yang digunakan studi kepustakaan dan sumber data lainnya yang terkait.

PEMBAHASAN

Pengertian Arbitrase

Secara harfiah, perkataan arbitrase adalah berasal dari kata *arbitrare* (Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan, secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini walaupun pada akhirnya mempunyai inti makna yang sama. (www.google.com). Para sarjana mengatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Di Indonesia, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Perangkat aturan mengenai arbitrase yakni UU No. 30 tahun 1999 mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (Yahya Harahap, 1994:32).

Secara garis besar, dalam arbitrase dirumuskan beberapa asas, yakni;

1. **Asas kesepakatan**, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter.
2. **Asas musyawarah**, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri;
3. **Asas limitatif**, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, yaitu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak;
4. **Asas final dan mengikat**, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase. Menurut Huala Adolf (1999:27) bahwa Para Pihak dalam

Arbitrase antara lain:

1. Para Pihak

Para pihak dalam arbitrase adalah para subyek hukum yang memiliki kemampuan hukum untuk menutup suatu perjanjian. Unsur kemampuan ini sangat penting, tanpa unsur ini, suatu perjanjian akan menjadi tidak sah. Berdasarkan subyek hukumnya, maka para pihak yang dapat masuk ke dalam persidangan arbitrase, dibagi dalam empat kelompok, yaitu; (a) Orang perorangan, (b) Lembaga-lembaga hukum, (c) Lembaga-lembaga/ organisasi pemerintah dan (d) Negara. Dalam pasal 615 Reglemen Acara Perdata (RV0, tidak tegas ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menjadi para pihak dalam arbitrase, namun dikatakan bahwa setiap orang dapat menyerahkan perselisihan mengenai hak-hak yang ia kuasai secara bebas kepada kepentingan wasit.

2. Alamat atau kedudukan para pihak

Para pihak harus memiliki alamat dan tempat kedudukan di negara-negara yang berbeda ketika mengadakan suatu perjanjian.

3. Nasionalitas para pihak

Para pihak bersepakat memilih arbitrator yang tepat kompeten, jujur dan memiliki integritas bukan saja pribadinya akan tetapi kemampuan dan keahliannya tentang inti sengketa yang dihadapi. Jumlah arbitrator (wasit) yang akan dipilih tergantung dari keinginan para pihak, bisa satu, bisa lebih, misalnya 3 orang, satu dipilih masing-masing oleh para pihak dan yang ketiga oleh mereka bersama sehingga dengan demikian dicapai jumlah yang ganjil.

Setelah dipilih dan menerima pengangkatannya, Arbiter mempunyai **hak dan kewajiban** sebagai berikut:

- a. Ia harus independen dan menunjukkan sikap dan tidak memihak terbuka maupun tertutup
- b. Harus menyampaikan kepada para pihak yang bersengketa, apa yang menjadi ide atau jalan pikiran terhadap perkara yang dihadapi.
- c. Terikat untuk menerapkan tata cara dalam menghargai dan menghormati hak-hak para pihak untuk didengar.
- d. Menyelesaikan dan memberi putusan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- e. Memelihara kredibilitas para pihak sampai keputusan dikeluarkan.
- f. Selama pemeriksaan ia berhak memperoleh kerjasama

yang jujur dan terbuka dari para pihak
g. Arbiter tidak dapat dituntut karena keputusannya, kecuali jika ia terbukti tidak memihak.

Alasan Para Pihak untuk memilih Arbitrase / Keuntungan Arbitrase (www.google.com).

1. Kebebasan, kepercayaan, keamanan.

Para pihak yang bersengketa merasa bebas dan mempercayakan sengketa mereka kepada arbiter tanpa adanya perasaan takut diketahui oleh pihak lain.

2. Keahlian

Dalam Arbitrase seorang arbiter yang diangkat/dipilih, dianggap memiliki keahlian dalam pokok persoalanyang dipersengketakan.

3. Cepat dan hemat biaya

Arbitrase lebih cepat dan lebih murah daripada proses pengadilan, karena para pihak tidak harus menunggu lebih lama, dan faktor ini mengurangi biaya-biaya pemeriksaan.

4. Bersifat rahasia

Sifat rahasia arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan akibat penyingkapan informasi kepada umum.

5. Bersifat non preseden

Dalam prinsip hukum yang presedennya mempunyai pengaruh penting dalam pengambilan keputusan arbitrase, maka pengambilan keputusan harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para pihak.

6. Kepekaan arbiter

Dalam hal-hal yang relevan, arbiter akan memberikan kepastian yang besar terhadap keinginan realitas para pihak, karena arbiter dapat mempertimbangkan sengketa yang bersifat pribadi dan umum.

7. Pelaksanaan putusan

Keputusan Arbitrase dapat dilaksanakan daripada keputusan pengadilan. Hal ini dikarenakan keputusan arbitrase pada umumnya dianggap formal dan tidak dapat diajukan banding, kecuali atas dasar hal yang sangat khusus yang berkenaan dengan banyak putusan yang bersifat internasional.

8. Kecenderungan yang modern

Hal ini dilakukan dengan memberikan keuntungan kepada para pihak untuk menunjukkan hukum atau prinsip yang adil yang dapat diterapkan sengketa yang

terjadi antara mereka, dan juga memberikan kewenangan kepada mereka untuk memilih para arbiter sekaligus aturan-aturan professional yang dapat diterapkan dalam arbitrase.

Beberapa faktor yang merupakan kelemahan arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Hanya untuk para pihak bonafide

Arbitrase hanya bermanfaat untuk para pihak atau pengusaha yang bona fide (*bonafid*) atau jujur dan dapat dipercaya. Para pihak yang bonafid adalah mereka yang memiliki kredibilitas dan integritas, artinya patuh terhadap kesepakatan, pihak yang dikalahkan harus secara suka rela melaksanakan putusan arbitrase. Sebaliknya, jika ia selalu mencari-cari peluang untuk menolak melaksanakan putusan arbitrase, perkara melalui arbitrase justru akan memakan lebih banyak biaya, bahkan lebih lama daripada proses di pengadilan. di dalam praktik bahwa para pihak, walaupun mereka telah memuat klausul arbitrase dalam perjanjiannya, tetap saja mereka mengajukan perkaranya ke pengadilan. Dan terdapat klausul arbitrase di dalam perjanjian, masih ada pengadilan negeri yang menerima gugatan perkara tersebut. (dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa: *"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase"*).

2. Ketergantungan mutlak pada arbiter

Putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbiter memiliki keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi majelis arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para pihak yang bersengketa. Pihak yang kalah akan mengatakan bahwa putusan arbitrase tidak adil, demikian pula sebaliknya. Ketergantungan secara mutlak terhadap para arbiter dapat merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali.

3. Tidak ada preseden putusan terdahulu

Putusan arbitrase dan seluruh pertimbangan di dalamnya bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan. Akibatnya, putusan tersebut bersifat mandiri dan terpisah dengan lainnya, sehingga tidak ada keterikatan terhadap

putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Artinya, putusan-putusan arbitrase atas suatu sengketa terbangun tanpa manfaat, meskipun di dalamnya mengandung argumentasi-argumentasi berbobot dari para arbiter terkenal di bidangnya.

4. Masalah putusan arbitrase asing

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional memiliki hambatan sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusnya. Kesulitan itu menjadi masalah yang sangat penting karena biasanya di negara pihak yang kalah terdapat harta yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, berhasil tidaknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkaitan erat dengan dapat tidaknya putusan arbitrase tersebut dilaksanakan di negara dari pihak yang dikalahkan.

Syarat Perjanjian Arbitrase

Menurut Eman Suparman (2004:55) bahwa berdasarkan pengertian arbitrase, perlu ditegaskan syarat utama dari berlangsungnya suatu arbitrase adalah perjanjian dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme arbitrase. Maksudnya, perjanjian dapat lahir sebelum adanya sengketa atau sesudah adanya sengketa

Dengan adanya perjanjian arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, akan tetapi yang dipermasalahkan adalah cara dan lembaga apa yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak yang berjanji.

Perjanjian arbitrase sering juga disebut sebagai klausul arbitrase yang berada dalam badan perjanjian pokok, hal tersebut dapat diartikan suatu perjanjian pokok diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Klausul arbitrase ini diletakkan dalam perjanjian pokok yang membahas mengenai suatu isengketa/permasalahan dari para pihak, sehingga disebut sebagai perjanjian aksesori. Keberadaannya hanya sebagai tambahan dari perjanjian pokok, sehingga tidak berpengaruh terhadap pemenuhan perjanjian pokok.

Prosedur Pelaksanaan Arbitrase

Menurut Gatot Soemartono (2006:41) bahwa secara

garis besar, **prosedur arbitrase dapat dibagi ke dalam (3) tiga tahap** sebagai berikut:

1. **Prosedur sebelum dengar pendapat.** Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, diawali dengan prosedur sebelum dengar pendapat yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut.

a. **Pemberitahuan kepada arbiter tentang penunjukannya.** Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk melakukan arbitrase adalah pemberitahuan secara tertulis kepada seorang ahli bahwa ia telah dipilih sebagai arbiter untuk menyelesaikan suatu sengketa.

b. **Persiapan arbiter.** Hal penting yang perlu diperhatikan oleh arbiter adalah penunjukannya sudah dilakukan berdasarkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c. **Pemeriksaan pendahuluan.** Berdasarkan praktek, biasanya arbiter mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan para pihak sebelum mengadakan dengar pendapat secara resmi.

d. **Prosedur pelaksanaan tugas arbiter.** Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter berwenang untuk memerintahkan dan melakukan interogasi dalam proses dengar pendapat. Dalam proses tersebut, arbiter dapat bersikap aktif, yaitu: arbiter bertindak mencari data. Namun, arbiter juga dapat bersikap pasif, yaitu para pihak lah yang menyampaikan data-data sedangkan arbiter cukup mendengarkan saja.

e. **Menentukan waktu dan dengar pendapat.** Jika ada salah satu pihak yang tidak datang pada saat dengar pendapat; maka arbiter tetap dapat melakukan dengar pendapat tersebut.

f. **Komunikasi perorangan para pihak.** Apabila salah satu pihak dalam proses arbitrase menghubungi arbiter tanpa sepengetahuan pihak lain, arbiter wajib menolaknya.

2. **Prosedur pada waktu dengar pendapat.** Arbiter memiliki kedudukan sebagai seorang hakim berdasarkan adanya kesepakatan penunjukan para pihak yang bersengketa. Penunjukan oleh para pihak ini memberikan wewenang kepada arbiter untuk dapat memutus berdasarkan fakta yang diberikan kepadanya. Pada saat proses arbitrase berlangsung pihak ketiga atau pihak lain tidak diperbolehkan hadir dalam proses.

3. **Pelaksanaan putusan,** dalam melaksanakan putusan

arbitrase ada tata cara pelaksanaan yang harus ditempuh. Berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tata cara pelaksanaan pokok-pokok di dalam putusan tergantung pada telah didaftarkanya di pengadilan atau belum.

Putusan Final dan Mengikat

Priyatna Abdurrasyid (2002:62) mengemukakan bahwa: Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga tidak dimungkinkan upaya hukum banding atau kasasi. Dalam Pasal 53 UU No. 30/1999 disebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan perlawanan atau upaya hukum apa pun. Sedangkan dalam Pasal 60 secara tegas disebutkan: *"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."*

Tetapi dalam pelaksanaan putusan arbitrase seringkali tidak mempunyai kekuatan hukum yang final dan mengikat para pihak yang bersengketa, yaitu: Putusan arbitrase tidak mempunyai kekuatan secara eksekutorial yang kuat, putusan arbitrase harus didaftarkan terlebih dahulu kepada pengadilan negeri agar putusan tersebut dapat dieksekusi. Dalam beberapa kasus masih ditemukan intervensi lembaga pengadilan dapat memeriksa dan mengadili sengketa yang telah disepakati adanya klausul arbitrase, hal ini karena ada penyimpangan ketentuan-ketentuan terhadap perundang-undangan dan diikuti ada upaya delegitimasi terhadap putusan arbitrase oleh lembaga pengadilan.

Dalam pelaksanaan Putusan arbitrase masih dapat dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu pembatalan putusan arbitrase. Penolakan putusan arbitrase oleh lembaga pengadilan menyebabkan putusan mempunyai kekuatan final dan mengikat tetapi tidak dapat dilaksanakan di wilayah hukum pengadilan yang menolaknya.

Definisi **ketertiban umum** yang tidak jelas menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga dapat digunakan sebagai alasan diajukan upaya pembatalan atau penolakan putusan arbitrase. Beberapa hal tersebut di atas akan berakibat adanya pembiasan konsepsi mengenai putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat para pihak. Agar lembaga arbitrase dapat menjadi tempat penyelesaian sengketa final, mandiri

dan independen, seyogyanya dapat dilakukan dengan jalan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Secara umum pengertian **Final dan mengikat** sudah tidak dimungkinkan lagi adanya upaya hukum, karena para pihak yang bersengketa sudah sepakat untuk membawa perkara sengketanya ke arbitrase, dimana mereka mempercayakan kerahasiaan perkaranya kepada pihak arbiter, sehingga segala perselisihan yang ada dapat diselesaikan oleh pihak arbiter dengan jalan damai. Dengan kata lain arbiter tidak memihak dengan pihak lain, dan apa yang menjadi keputusannya harus diterima dan dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa, maka keadilan dan kepastian hukum diantara para pihak dapat tercapai dengan baik.

Kalaupun dilaksanakan Amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka pada Pasal 60, yang berisi tentang putusan arbitrase final dan mengikat, tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya upaya hukum dan bebas dari campur tangan pihak pengadilan negeri. Alasan pihak yang bersengketa, dalam memilih jalur arbitrase yaitu penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan, dikarenakan adanya keuntungan-keuntungan yang dimiliki arbitrase dibandingkan jika perkara sengketanya diselesaikan melalui pengadilan. (Yahya Harahap, 1994:58).

Jaminan keadilan, kepastian hukum, serta keputusan yang memuaskan selalu menjadi keinginan setiap orang, khususnya bagi pihak yang mempunyai perkara sengketanya belum memiliki kejelasan akan kemana arah penyelesaiannya. Tetapi jalur arbitrase hanya bisa menyelesaikan masalah/konflik dalam bidang perniagaan atau perdagangan, konsumen, lingkungan, bisnis artinya hanya untuk kasus-kasus tertentu yang dapat dianggap mudah penyelesaiannya dan bersifat sederhana.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa arbitrase prosedurnya memiliki keuntungan dibandingkan dengan pengadilan dan dapat memberikan kepastian bagi para pihak yang bersengketa.
2. Putusan arbitrase final dan mengikat serta tidak dimungkinkan upaya hukum.

Saran-saran

1. Pihak Arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, harus memiliki keahlian khusus dalam menangani konflik antara para pihak, dan tidak bersifat memihak.
2. Dalam Putusan Arbitrase, pihak yang kalah harus dapat menerima dan tidak dimungkinkan lagi ada upaya hukum, karena arbitrase merupakan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, Tatanusa, Jakarta, 2004
- Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2006
- Huala Adolf, *Arbitrase Komersial International*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999
- H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Fikahati, Aneska, Jakarta, 2002
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau Dari Reglemen Acara Perdata*, Sinar Grafika, Bandung, 1994
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

UPAYAKAN PENYELESAIAN SENGKETA YANG MENGUNTUNGAN PARA PIHAK